

Transformasi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Kesadaran Inklusif di Era Digital: Perspektif Sosiologi Pendidikan

Ahmad Salim Ulul Albab¹, Asnawan², Syaiful Anwar³, Futuh Muafi⁴

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Al Falah Assuniyah, Jember, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email: ahmadsalimululalbab22@gmail.com, asnawan@uas.ac.id, Syaifulanwar400@gmail.com,
futuhmuafi@gmail.com,

Diterima: 01-07-2026 | Disetujui: 07-07-2026 | Diterbitkan: 09-07-2026

ABSTRACT

Indonesia's multicultural society is confronted with increasingly complex challenges driven by the rapid advancement of the digital era, including the rise of intolerance, social polarization, identity politics, and the widespread dissemination of hate speech through digital media. These challenges indicate that the current education system has not yet effectively fostered the inclusive awareness required to manage diversity constructively. This study aims to analyze the transformation of multicultural education in fostering inclusive awareness in the digital era from the perspective of the sociology of education. The study employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from a wide range of scholarly sources, including books, national and international journal articles, and other relevant academic publications, and were analyzed through content analysis. The findings reveal that multicultural education should not be limited to the normative transmission of tolerance values but should be reoriented toward pedagogical transformation that promotes critical consciousness, social empathy, and students' dialogical competencies. A synthesis of the educational perspectives of Pierre Bourdieu, Paulo Freire, and Émile Durkheim demonstrates that education should be reconstructed through an inclusive curriculum, dialogical learning, the enhancement of critical digital literacy, and the transformation of teachers' roles as social mediators. This study proposes a conceptual model of multicultural education transformation that integrates these three theoretical perspectives as a strategic framework for strengthening students' inclusive awareness in responding to the challenges of an increasingly diverse digital society. The proposed model is expected to serve as a conceptual reference for developing educational policies and practices that are more democratic, humanistic, and socially just.

Keywords: Multicultural Education; Inclusive Awareness; Sociology of Education; Digital Era; Educational Transformation.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang multikultural menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan era digital, seperti meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, politik identitas, serta penyebaran ujaran kebencian melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran inklusif yang diperlukan untuk mengelola keberagaman secara konstruktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran inklusif di era digital melalui perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak cukup dipahami sebagai penyampaian nilai-nilai toleransi secara normatif, tetapi harus diarahkan pada transformasi pedagogis yang mendorong terbentuknya kesadaran kritis, empati sosial, dan kemampuan dialogis peserta didik. Sintesis pemikiran Pierre Bourdieu, Paulo Freire, dan Émile Durkheim menunjukkan bahwa pendidikan perlu direkonstruksi melalui kurikulum yang inklusif, pembelajaran dialogis, penguatan literasi digital kritis, serta transformasi peran guru sebagai mediator sosial. Penelitian ini menawarkan model konseptual transformasi pendidikan multikultural yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut sebagai strategi untuk memperkuat kesadaran inklusif peserta didik dalam menghadapi tantangan masyarakat digital yang semakin plural. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih demokratis, humanis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: pendidikan multikultural, kesadaran inklusif, sosiologi pendidikan, era digital, transformasi pendidikan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, ditandai oleh keberadaan lebih dari seribu kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta keberagaman agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa (Badan Pusat Statistik, 2024; UNESCO, 2023). Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban serta menjadi fondasi penting bagi penguatan kohesi sosial apabila dikelola melalui sistem pendidikan yang menghargai pluralitas (James A. Banks, 2020; Cathrin & Wikandaru, 2023). Namun, pada saat yang sama, pluralitas juga menghadirkan tantangan yang kompleks apabila tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan secara konstruktif (Jalal, 2024; Jaswan, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang interaksi sosial, tetapi juga mempercepat penyebaran intoleransi, ujaran kebencian, politik identitas, disinformasi, serta polarisasi sosial yang berpotensi mengikis kohesi sosial (Madaio et al., 2021; Cathrin & Wikandaru, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa perubahan pada aspek teknologi, tetapi juga memengaruhi pola hubungan sosial, pembentukan identitas, dan cara masyarakat memandang keberagaman sehingga diperlukan penguatan pendidikan multikultural yang mampu membangun kesadaran inklusif di era digital (Hermawan, 2024; Jaswan, 2025).

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki posisi strategis sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk karakter, kesadaran sosial, serta kemampuan peserta didik untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk (Banks, 2020; UNESCO, 2023). Pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai proses *transfer of values* yang bertujuan menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat (Freire, 2005; OECD, 2023). Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat kontemporer, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas interaksi sosial pada era digital (Cathrin & Wikandaru, 2023; Jalal, 2024). Pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan pengakuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas sosial, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dialog antarbudaya, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang inklusif dan demokratis (Banks, 2020; Gay, 2022; Hermawan, 2024).

Urgensi pendidikan multikultural semakin meningkat pada era digital ketika ruang pembelajaran tidak lagi terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga berlangsung melalui media sosial, platform digital, dan berbagai komunitas virtual. Transformasi tersebut menyebabkan peserta didik memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan tingkat kredibilitas yang beragam sehingga mereka dihadapkan pada berbagai narasi yang dapat memperkuat sikap toleran maupun sebaliknya memicu prasangka, diskriminasi, radikalisme, dan polarisasi sosial (UNESCO, 2023; OECD, 2023). Fenomena *echo chamber*, personalisasi algoritma media sosial, serta penyebaran konten provokatif memperbesar kemungkinan peserta didik hanya terpapar pada informasi yang menguatkan keyakinan kelompoknya sendiri tanpa memperoleh ruang dialog yang sehat dengan kelompok lain, sehingga berpotensi memperkuat bias sosial dan intoleransi (Madaio et al., 2021; Cinelli et al., 2021). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak lagi cukup diposisikan sebagai materi pembelajaran,

tetapi harus dikembangkan sebagai paradigma pendidikan yang mampu membangun literasi digital kritis, kemampuan reflektif, dialog lintas budaya, dan kesadaran inklusif dalam menghadapi kompleksitas masyarakat digital (Banks, 2020; Cathrin & Wikandaru, 2023).

Perkembangan penelitian mengenai pendidikan multikultural dalam lima tahun terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap peran pendidikan sebagai sarana membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan multikultural berkontribusi terhadap penguatan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, pengembangan karakter demokratis, serta peningkatan kompetensi sosial peserta didik (Cathrin & Wikandaru, 2023; Hermawan, 2024). Penelitian Jalal (2024) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun kesadaran sosial mahasiswa melalui interaksi lintas budaya, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan, budaya akademik, dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat dipengaruhi oleh kesiapan kurikulum, kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, serta dukungan kebijakan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya peserta didik (UNESCO, 2023; OECD, 2023).

Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun harmoni sosial melalui penguatan nilai toleransi, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan multikultural tidak hanya berorientasi pada pengenalan keberagaman budaya, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi stereotip, diskriminasi, prasangka, serta ketidakadilan sosial melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dialog antarbudaya, dan kolaborasi lintas identitas (Banks, 2020; Gay, 2022; Cathrin & Wikandaru, 2023). Meskipun demikian, berbagai penelitian mengenai implementasi pendidikan multikultural di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada lemahnya konsep pendidikan multikultural, melainkan pada kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan secara normatif dengan praktik pembelajaran di sekolah maupun interaksi peserta didik dalam ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi pendidikan multikultural yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan literasi digital, kesadaran kritis, dan penguatan budaya sekolah yang inklusif sebagai bagian dari transformasi pendidikan pada era digital (Hermawan, 2024; UNESCO, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi terhadap penguatan toleransi, pengembangan karakter demokratis, serta penghormatan terhadap keberagaman, kecenderungan penelitian masih berfokus pada implementasi kurikulum, strategi pembelajaran, dan internalisasi nilai-nilai multikultural dalam lingkungan sekolah (Cathrin & Wikandaru, 2023; Jalal, 2024; James A. Banks, 2020). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan praktik pendidikan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pendidikan multikultural dapat direkonstruksi sebagai strategi transformasi sosial yang mampu merespons perubahan struktur masyarakat akibat digitalisasi. Akibatnya, pendidikan multikultural masih lebih banyak diposisikan sebagai pendekatan pedagogis yang berorientasi pada pembentukan sikap toleran, sementara dimensi sosiologis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan, relasi kekuasaan, reproduksi budaya, pembentukan kesadaran kritis, serta integrasi sosial dalam masyarakat digital belum memperoleh perhatian yang memadai (Madaio et al., 2021; Hermawan, 2024).

Perkembangan masyarakat digital telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial, konstruksi identitas, serta proses pembentukan pengetahuan peserta didik. Ruang digital tidak lagi sekadar menjadi media komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi arena produksi makna, pertarungan ideologi, pembentukan opini publik, dan reproduksi nilai-nilai sosial yang memengaruhi cara individu memahami keberagaman. Selain itu, fenomena *filter bubble*, *echo chamber*, serta personalisasi algoritma media sosial mempersempit ruang dialog antarkelompok dan memperkuat polarisasi sosial sehingga peserta didik tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai toleransi sebagai nilai normatif, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran reflektif dalam menghadapi kompleksitas masyarakat digital (Cinelli et al., 2021; UNESCO, 2023; OECD, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi pendidikan multikultural yang tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga memperkuat dimensi sosial, moral, dan kewargaan digital peserta didik.

Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya menggunakan satu perspektif teori tertentu dalam menjelaskan pendidikan multikultural. Kajian yang berlandaskan pedagogi kritis Paulo Freire lebih menitikberatkan pada dialog, pembebasan, dan pengembangan kesadaran kritis, sedangkan penelitian yang menggunakan perspektif Pierre Bourdieu cenderung menjelaskan reproduksi ketimpangan sosial melalui konsep *habitus*, *cultural capital*, dan *symbolic violence*. Sementara itu, perspektif Émile Durkheim lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fungsi pendidikan dalam membangun solidaritas sosial dan integrasi masyarakat. Meskipun masing-masing perspektif memberikan kontribusi yang penting, penelitian yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut ke dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan transformasi pendidikan multikultural pada era digital masih relatif terbatas (Banks, 2020; Cathrin & Wikandaru, 2023; Jalal, 2024). Padahal, sintesis ketiga perspektif tersebut berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan, struktur sosial, kesadaran kritis, literasi digital, dan pembangunan masyarakat inklusif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, pedagogi kritis Paulo Freire, dan teori solidaritas sosial Émile Durkheim dalam menganalisis transformasi pendidikan multikultural. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** yang menempatkan pendidikan multikultural tidak hanya sebagai pendekatan pedagogis, tetapi sebagai strategi transformasi sosial yang mengintegrasikan kurikulum inklusif, pembelajaran dialogis, literasi digital kritis, dan penguatan peran guru sebagai mediator sosial. Model ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi pendidikan sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih adaptif terhadap tantangan masyarakat digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran inklusif di era digital melalui perspektif sosiologi pendidikan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pendidikan multikultural dalam menghadapi perubahan sosial pada era digital, mengkaji relevansi pemikiran Pierre Bourdieu, Paulo Freire, dan Émile Durkheim dalam menjelaskan transformasi pendidikan multikultural, serta merumuskan **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** sebagai kerangka konseptual yang dapat memperkuat kesadaran inklusif peserta didik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi pendidikan sekaligus menjadi rujukan praktis bagi

pengambil kebijakan, lembaga pendidikan, dan pendidik dalam merancang kebijakan, kurikulum, dan strategi pembelajaran yang lebih demokratis, humanis, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **kepastakaan (library research)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam konsep transformasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran inklusif di era digital melalui perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian kepastakaan digunakan karena objek kajian berupa gagasan, konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga analisis difokuskan pada sintesis berbagai literatur ilmiah untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif (Creswell & Creswell, 2018; Snyder, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang membahas pendidikan multikultural, sosiologi pendidikan, pendidikan inklusif, literasi digital, pedagogi kritis, serta transformasi pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi dalam kurun waktu 2021–2026. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku akademik, prosiding ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta laporan lembaga nasional maupun internasional yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, karya-karya klasik Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Émile Durkheim, James A. Banks, dan Bhikhu Parekh digunakan sebagai landasan teoritis untuk memperkuat analisis konseptual dan memperkaya sintesis hasil penelitian (Banks, 2020; Freire, 2005).

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi** dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang diperoleh dari pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Crossref, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda, ERIC, dan Scopus. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci *multicultural education, inclusive education, sociology of education, critical pedagogy, digital literacy, digital citizenship, pluralism, dan educational transformation*. Seluruh literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kualitas publikasi, tahun terbit, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian pendidikan multikultural dalam konteks masyarakat digital. Proses seleksi tersebut bertujuan memperoleh sumber yang kredibel dan mutakhir sehingga mampu mendukung analisis secara komprehensif (Xiao & Watson, 2019).

Analisis data menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)**, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber ilmiah secara sistematis (Krippendorff, 2019). Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah **reduksi data**, yaitu proses memilih dan mengelompokkan literatur sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah **kategorisasi**, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang meliputi konsep pendidikan multikultural, tantangan pendidikan pada era digital, perspektif sosiologi pendidikan, serta strategi transformasi pendidikan. Tahap ketiga adalah **analisis komparatif**, yaitu membandingkan berbagai hasil penelitian dan perspektif teoritis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan perkembangan kajian pendidikan multikultural. Tahap keempat adalah **sintesis konseptual**, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian dan perspektif teori Pierre Bourdieu, Paulo Freire, serta Émile Durkheim untuk merumuskan **Model Transformasi Pendidikan**

Multikultural Integratif (MTPMI) sebagai kerangka konseptual dalam membangun kesadaran inklusif peserta didik di era digital.

Untuk meningkatkan keabsahan hasil analisis, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis referensi ilmiah, baik artikel jurnal, buku akademik, maupun dokumen kebijakan pendidikan (Patton, 2015). Selain itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, reputasi jurnal atau penerbit, konsistensi temuan penelitian, serta relevansinya terhadap fokus kajian. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan bias interpretasi sekaligus memastikan bahwa sintesis konseptual yang dihasilkan memiliki landasan akademik yang kuat.

Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif sosiologi pendidikan untuk menjelaskan hubungan antara pendidikan multikultural, dinamika masyarakat digital, pembentukan kesadaran inklusif, serta transformasi praktik pendidikan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perkembangan konsep dalam literatur, tetapi juga menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana pendidikan multikultural dapat direkonstruksi sebagai strategi transformasi sosial dalam menghadapi tantangan keberagaman pada era digital.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara individu memperoleh informasi, tetapi juga menggeser pola komunikasi, pembentukan identitas, hingga mekanisme interaksi sosial dalam masyarakat. Kehadiran media sosial, platform pembelajaran digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta berbagai teknologi berbasis internet telah menciptakan ruang sosial baru yang mempertemukan individu dari latar belakang budaya, agama, bahasa, dan identitas yang sangat beragam. Perubahan tersebut memberikan peluang besar bagi berkembangnya masyarakat yang lebih terbuka dan kolaboratif, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan berbagai tantangan baru berupa polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta menguatnya politik identitas (UNESCO, 2023; OECD, 2023; Madaio et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan kesadaran sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola keberagaman secara bijaksana dalam kehidupan digital (Selwyn, 2022; Cathrin & Wikandaru, 2023).

Dalam konteks tersebut, pendidikan multikultural memperoleh posisi yang semakin strategis sebagai pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Pendidikan multikultural tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai penyampaian materi mengenai keberagaman budaya atau toleransi antarumat beragama. Pada era digital, pendidikan multikultural harus berfungsi sebagai proses transformasi sosial yang membangun kesadaran peserta didik agar mampu memahami kompleksitas masyarakat modern, menghargai perbedaan, berpikir kritis terhadap berbagai informasi yang diterima, serta berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Banks, 2020; Gay, 2022; Jalal, 2024). Dengan demikian, orientasi pendidikan bergeser dari sekadar pencapaian akademik menuju pembentukan kompetensi sosial yang

memungkinkan peserta didik hidup secara produktif dalam masyarakat yang plural (Hermawan, 2024; Cathrin & Wikandaru, 2023).

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif sosiologi pendidikan memandang sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, melainkan sebagai institusi sosial yang membentuk nilai, norma, pola pikir, dan identitas peserta didik (Durkheim, 2006; Apple, 2019). Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengalami proses sosialisasi yang memengaruhi cara mereka memahami diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, setiap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan membawa implikasi terhadap fungsi pendidikan, termasuk dalam upaya membangun kesadaran inklusif di tengah meningkatnya kompleksitas kehidupan digital (Biesta, 2020; OECD, 2023).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan rendahnya kualitas pembelajaran atau keterbatasan akses terhadap pendidikan, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem pendidikan dalam membentuk warga negara yang mampu hidup bersama di tengah keberagaman. Meningkatnya kasus intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, perundungan digital (*cyberbullying*), penyebaran informasi palsu (*fake news*), serta konflik sosial yang dipicu oleh media digital menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui capaian akademik (UNESCO, 2023; OECD, 2023). Pendidikan juga harus mampu membangun karakter sosial yang memungkinkan peserta didik mengembangkan empati, tanggung jawab, kemampuan berdialog, dan kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain. Dalam perspektif ini, pendidikan multikultural menjadi kebutuhan yang bersifat strategis, bukan sekadar pelengkap kurikulum (Banks, 2020; Gay, 2022).

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menghadapi persoalan reproduksi ketimpangan sosial. Bourdieu menjelaskan bahwa sekolah sering kali menjadi arena reproduksi budaya dominan melalui mekanisme yang berlangsung secara halus sehingga peserta didik tanpa sadar menginternalisasi nilai dan cara pandang tertentu sebagai sesuatu yang dianggap normal (Bourdieu & Passeron, 1990). Pada era digital, mekanisme reproduksi tersebut tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi pendidikan formal, tetapi juga melalui media sosial, mesin pencari, algoritma digital, serta berbagai platform komunikasi yang membentuk preferensi dan pola pikir pengguna. Dengan demikian, ruang digital dapat dipahami sebagai arena sosial baru (*digital field*) yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pembentukan *habitus* generasi muda (Couldry & Hepp, 2018; Selwyn, 2022).

Dalam arena digital tersebut, modal budaya (*cultural capital*) mengalami transformasi. Jika sebelumnya modal budaya lebih banyak berkaitan dengan kemampuan akademik, bahasa, atau latar belakang keluarga, maka pada era digital modal budaya juga mencakup kemampuan mengakses informasi, mengelola teknologi, memahami literasi digital, membangun jejaring sosial, serta memproduksi konten yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat (Bourdieu, 1986; Selwyn, 2022). Peserta didik yang memiliki akses teknologi dan kemampuan digital yang baik akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan akses maupun literasi digital. Akibatnya, ketimpangan pendidikan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial,

tetapi juga oleh kesenjangan digital (*digital divide*) yang semakin nyata (van Dijk, 2020; UNESCO, 2023).

Perspektif Bourdieu memberikan pemahaman bahwa pendidikan multikultural tidak cukup hanya mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman, tetapi juga harus menciptakan kesempatan belajar yang adil bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya, sosial, maupun kemampuan digital. Pengakuan terhadap keberagaman identitas perlu diikuti dengan penyediaan ruang belajar yang mampu mengakomodasi berbagai pengalaman sosial peserta didik sehingga sekolah tidak menjadi institusi yang mereproduksi dominasi budaya tertentu (Bourdieu & Passeron, 1990; Banks, 2020; Cathrin & Wikandaru, 2023).

Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan multikultural tidak dapat dilakukan melalui perubahan kurikulum semata. Perubahan yang dibutuhkan bersifat lebih mendasar, yaitu transformasi paradigma pendidikan yang mengintegrasikan pengakuan terhadap keberagaman, pengembangan kesadaran kritis, serta penguatan solidaritas sosial sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendidikan harus bergerak dari paradigma transmisi pengetahuan menuju paradigma transformasi sosial yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mampu menghadapi kompleksitas masyarakat digital secara cerdas, reflektif, dan bertanggung jawab (Banks, 2020; Biesta, 2022; UNESCO, 2023).

Transformasi paradigma pendidikan sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan multikultural pada era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan model pendidikan konvensional. Pendidikan tidak lagi cukup diposisikan sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi ruang transformasi yang membangun kapasitas intelektual, sosial, moral, dan digital peserta didik secara terpadu. Dalam konteks ini, sintesis antara perspektif Pierre Bourdieu, Paulo Freire, dan Émile Durkheim memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan dimensi pengakuan terhadap keberagaman, pemberdayaan melalui kesadaran kritis, serta penguatan solidaritas sosial. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk fondasi bagi terciptanya pendidikan yang inklusif pada era digital (Freire, 2005; Bourdieu & Passeron, 1990; Jalal, 2024).

Hasil sintesis konseptual menunjukkan bahwa dimensi pertama yang perlu diperkuat adalah **rekognisi terhadap keberagaman** (*recognition of diversity*). Rekognisi tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal terhadap adanya perbedaan budaya, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial peserta didik, tetapi juga sebagai komitmen institusi pendidikan untuk menjadikan keberagaman tersebut sebagai sumber belajar. Sekolah perlu menciptakan budaya akademik yang memberikan ruang yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengekspresikan identitasnya tanpa mengalami diskriminasi ataupun marginalisasi. Pengakuan terhadap keberagaman juga harus tercermin dalam kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, hingga budaya organisasi sekolah sehingga seluruh peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang setara. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen homogenisasi budaya, tetapi menjadi ruang dialog yang menghargai pluralitas sebagai kekuatan sosial (Banks, 2020; Gay, 2022; Cathrin & Wikandaru, 2023).

Dimensi kedua adalah **pemberdayaan melalui kesadaran kritis** (*critical empowerment*). Pada era digital, peserta didik menghadapi arus informasi yang sangat besar sehingga kemampuan memahami,

mengevaluasi, dan merefleksikan informasi menjadi kompetensi yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan multikultural. Kesadaran kritis bukan hanya berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, tetapi juga kemampuan memahami hubungan antara informasi, kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan konstruksi sosial yang berkembang di ruang digital. Pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berdialog, mengajukan pertanyaan, menganalisis berbagai perspektif, serta membangun argumentasi berdasarkan data dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif sekaligus mampu menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi, intoleransi, dan diskriminasi yang berkembang di ruang digital (Freire, 2005; Giroux, 2020; UNESCO, 2023; OECD, 2023).

Dimensi ketiga adalah **penguatan solidaritas sosial** (*social solidarity*). Keberagaman tidak akan menjadi kekuatan sosial apabila tidak diikuti oleh kemampuan membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, tanggung jawab, dan kerja sama. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus diarahkan pada pembentukan pengalaman sosial yang memungkinkan peserta didik belajar hidup bersama melalui berbagai aktivitas kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi lintas budaya, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan kolaboratif yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang merupakan contoh strategi yang dapat memperkuat solidaritas sosial. Pengalaman tersebut akan membentuk kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial yang memperkaya proses belajar dan kehidupan bermasyarakat (Durkheim, 2006; Biesta, 2022; UNESCO, 2023).

Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan multikultural memerlukan perubahan paradigma yang menyentuh seluruh komponen pendidikan. Transformasi tidak cukup dilakukan melalui revisi kurikulum atau penambahan materi mengenai toleransi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Kurikulum perlu dirancang agar lebih responsif terhadap keberagaman peserta didik, proses pembelajaran harus memberikan ruang dialog yang setara, guru perlu mengembangkan kompetensi sebagai fasilitator dan mediator sosial, sementara budaya sekolah harus dibangun atas dasar nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak lagi dipahami sebagai program tambahan, melainkan menjadi paradigma yang menjiwai seluruh proses pendidikan (Banks, 2020; Hermawan, 2024; OECD, 2023).

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** sebagai kerangka konseptual untuk membangun kesadaran inklusif di era digital. Model ini berangkat dari asumsi bahwa kesadaran inklusif tidak terbentuk secara spontan, tetapi merupakan hasil interaksi antara kebijakan pendidikan, praktik pedagogis, budaya sekolah, serta pengalaman sosial peserta didik. Oleh karena itu, transformasi pendidikan perlu dilaksanakan secara sistematis melalui empat komponen utama yang saling berkaitan. Model ini memperluas kajian pendidikan multikultural dengan mengintegrasikan perspektif reproduksi sosial, pedagogi kritis, dan solidaritas sosial ke dalam satu kerangka konseptual yang adaptif terhadap tantangan masyarakat digital (Banks, 2020; Cathrin & Wikandaru, 2023; Jalal, 2024).

Komponen pertama adalah **kurikulum inklusif**, yaitu kurikulum yang memberikan representasi yang proporsional terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan identitas sosial peserta didik. Kurikulum inklusif tidak hanya memperluas materi pembelajaran mengenai keberagaman, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi, dan penghormatan terhadap

perbedaan ke dalam seluruh mata pelajaran sehingga keberagaman menjadi perspektif yang mewarnai keseluruhan proses pembelajaran (Banks, 2020; Gay, 2022).

Komponen kedua adalah **pembelajaran dialogis**. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dialog, refleksi, dan kolaborasi. Pembelajaran dialogis memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan mendengarkan, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan argumentasi secara rasional, serta menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang konstruktif. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari proses pembelajaran yang harus dialami secara langsung, bukan sekadar dipahami secara teoritis (Freire, 2005; Giroux, 2020).

Komponen ketiga adalah **penguatan literasi digital kritis**. Literasi digital dipahami tidak hanya sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan menyeleksi informasi, mengenali disinformasi, memahami etika digital, serta memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab. Literasi digital yang dikembangkan dalam pendidikan multikultural harus mampu membentuk peserta didik yang kritis terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi sekaligus mampu menggunakan teknologi sebagai sarana membangun dialog, kolaborasi, dan solidaritas sosial (UNESCO, 2023; OECD, 2023; Selwyn, 2022).

Komponen keempat adalah **transformasi peran guru sebagai mediator sosial**. Guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam membangun budaya sekolah yang inklusif. Guru berfungsi memfasilitasi dialog, mengelola konflik, membangun empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang budaya maupun identitas sosial. Perubahan peran tersebut menjadi sangat penting mengingat guru merupakan aktor utama yang menghubungkan kebijakan pendidikan dengan praktik pembelajaran di kelas (Hermawan, 2024; UNESCO, 2023).

Keempat komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang mengarah pada terbentuknya kesadaran inklusif. Kesadaran inklusif dipahami sebagai kemampuan peserta didik untuk menerima keberagaman sebagai realitas sosial, berpikir kritis terhadap berbagai bentuk diskriminasi, membangun hubungan yang dilandasi empati, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sosiologi pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, strategi pembelajaran, serta program penguatan kompetensi guru pada era digital (Banks, 2020; UNESCO, 2023; Jalal, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Transformasi masyarakat pada era digital telah mengubah secara mendasar peran pendidikan multikultural dari sekadar pendekatan pedagogis menjadi strategi transformasi sosial yang berorientasi pada pembentukan kesadaran inklusif peserta didik. Meningkatnya polarisasi sosial, politik identitas, intoleransi digital, disinformasi, serta melemahnya ruang dialog antarkelompok menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi cukup menanamkan nilai toleransi secara normatif, tetapi perlu membangun

kemampuan berpikir kritis, literasi digital, empati sosial, dan tanggung jawab kewargaan sebagai bekal menghadapi kompleksitas masyarakat digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sintesis perspektif Pierre Bourdieu, Paulo Freire, dan Émile Durkheim menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan masing-masing teori secara terpisah. Perspektif Bourdieu menegaskan pentingnya rekognisi terhadap keberagaman dan pengurangan reproduksi ketimpangan melalui penyediaan kesempatan belajar yang setara. Perspektif Freire menempatkan kesadaran kritis dan pembelajaran dialogis sebagai fondasi pembentukan peserta didik yang reflektif dan emansipatoris. Sementara itu, perspektif Durkheim memperlihatkan bahwa pendidikan berperan dalam membangun solidaritas sosial dan kohesi masyarakat yang semakin majemuk. Integrasi ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan multikultural harus dipahami sebagai proses yang menghubungkan dimensi pedagogis, sosiologis, dan kewargaan digital secara terpadu.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu **rekognisi terhadap keberagaman (*recognition of diversity*)**, **pemberdayaan melalui kesadaran kritis (*critical empowerment*)**, dan **penguatan solidaritas sosial (*social solidarity*)**. Ketiga dimensi tersebut diimplementasikan melalui empat komponen strategis, yaitu kurikulum inklusif, pembelajaran dialogis, penguatan literasi digital kritis, serta transformasi peran guru sebagai mediator sosial. Model ini menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan pendidikan multikultural tidak hanya sebagai pendekatan pembelajaran, tetapi sebagai strategi transformasi sosial yang mampu memperkuat kesadaran inklusif peserta didik dalam menghadapi tantangan masyarakat digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi pendidikan sekaligus menjadi dasar konseptual bagi penyusunan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih demokratis, humanis, adaptif, dan berkeadilan.

Implementasi pendidikan multikultural memerlukan transformasi yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari kebijakan, kurikulum, proses pembelajaran, hingga budaya sekolah. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pengambil kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, literasi digital kritis, pembelajaran dialogis, serta penguatan karakter demokratis ke dalam penyelenggaraan pendidikan agar peserta didik mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang semakin plural dan terdigitalisasi.

Bagi pendidik, **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran yang partisipatif, reflektif, dan kolaboratif melalui penguatan dialog lintas budaya, pembelajaran berbasis proyek, dan literasi digital kritis. Implementasi model ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, menghargai keberagaman, membangun empati sosial, serta berpartisipasi sebagai warga digital yang bertanggung jawab.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga diperlukan penelitian empiris untuk menguji efektivitas **Model Transformasi Pendidikan Multikultural Integratif (MTPMI)** pada berbagai jenjang pendidikan dan konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga perlu mengembangkan instrumen yang valid dan reliabel untuk mengukur dimensi rekognisi terhadap keberagaman, kesadaran kritis, solidaritas sosial, literasi digital kritis, dan kesadaran inklusif sehingga

model yang ditawarkan dapat diuji, disempurnakan, dan diimplementasikan secara lebih luas dalam praktik pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2020). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (2nd ed.). Sage.
- Durkheim, É. (2006). *Education and sociology*. Dover Publications. (Karya asli diterbitkan 1922).
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Gay, G. (2022). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Cathrin, S., & Wikandaru, R. (2023). Establishing multicultural society: Problems and issues of multicultural education in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59744>
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociochi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Madaio, M. A., Blodgett, S. L., Mayfield, E., & Dixon-Román, E. (2021). Beyond fairness: Structural (in)justice lenses on AI for education. *Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO.